

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Tahun Anggaran 2014-2018)

Sony Aulia Dwita A.M¹⁾Yunilma¹⁾Meihendri²⁾
 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta
 Email : sony.auliadwita@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Anggaran negara merupakan alat perencanaan mengidentifikasi target yang harus dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Anggaran merupakan dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintahan) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai [1]. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan anggaran negara yang disusun setiap tahunnya di Indonesia. Oleh karena itu APBN mempunyai peran yang sangat penting karena menjadi alat utama bagi negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, untuk menguji pengaruh administrasi terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, untuk menguji pengaruh dokumen pengadaan barang dan jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, dan untuk menguji pengaruh Ganti Uang Persediaan (GUP) terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai media dalam pengumpulan data. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang menduduki jabatan dibidang yang berkaitan dengan anggaran yaitu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PP- SPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), Penanggungjawab Program (Ka.Bid dan Kasie) Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, dan ULP serta pegawai yang terkait dengan pengelolaan keuangan, dengan jumlah sampel menjadi 60 responden. Sampel diambil

di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Penelitian ini menggunakan variabel keterlambatan penyerapan anggaran sebagai variabel dependen diukur dengan tiga item pernyataan. Variabel independen pada penelitian ini yaitu variabel perencanaan diukur dengan menggunakan sembilan item pernyataan. Variabel administrasi diukur dengan menggunakan enam item pernyataan. Variabel kompetensi Sumber Daya Manusia menggunakan lima item pernyataan. Variabel dokumen pengadaan barang/jasa menggunakan lima item pernyataan. Variabel Ganti Uang Persediaan (GUP) menggunakan empat item pernyataan [2]. Teknik analisis data pengujian hipotesis meliputi analisis regresi berganda, Koefisien determinasi (R^2), Uji statistik F dan Uji statistik t dengan menggunakan SPSS 21 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	T	Alpha	Sig
Constanta	-9,599	-2,974		
Perencanaan	0,462	2,880.	0,05	0,00
Administrasi	0,750	2,884	0,05	0,00
Kompetensi sumber daya manusia	0,271	1,907	0,05	0,06
Dokumen pengadaan barang dan jasa	0,249	1,546	0,05	0,13
Ganti uang persediaan	0,232	1,206	0,05	0,23
R-square				0,280
F				0,040

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis pertama perencanaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran nilai perencanaan tinggi maka nilai keterlambatan penyerapan anggaran akan semakin tinggi, Rencana dan anggaran merupakan satu kesatuan ketika Satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang memiliki perencanaan dalam penyerapan anggaran maka keterlambatan penyerapan tidak akan terjadi. Apa yang direncanakan

itu pula yang dianggarkan dan apa yang dianggarkan itu pula yang direalisasikan maka tentu penyerapan anggaran yang efektif dan efisien dapat dicapai [3]. Hipotesis kedua administrasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, ketika tingkat nilai administrasi tinggi, maka tingkat nilai keterlambatan penyerapan anggaran akan semakin tinggi. Organisasi yang memperhatikan dan melengkapi proses administrasi yang baik dapat membantu meningkatkan pencapaian kinerja yang baik. Maka dari itu, organisasi perlu memperhatikan proses administrasi yang harus dipenuhi, termasuk proses administrasi dalam pelaksanaan kegiatan [4]. Hipotesis ketiga kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran ketika nilai sumber daya manusia naik maka keterlambatan penyerapan anggaran akan semakin turun, walaupun organisasi mempunyai SDM yang mumpuni tetapi tidak menguasai kemampuan dalam menjalankan proses penyerapan anggaran di setiap tahun maka keterlambatan penyerapan anggaran akan tetap terjadi [5]. Hipotesis keempat dokumen pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran ketika tingkat nilai dokumen barang dan jasa naik maka keterlambatan penyerapan anggaran akan semakin baik, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif tidak dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Hipotesis kelima Ganti Uang Persediaan (GUP) tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran ketika ganti uang persediaan meningkat maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat, proses penyerapan anggaran tidak di tentukan dengan seberapa lancarnya ganti uang persediaan, ketika pimpinan di instansi menggunakan anggaran di instansi maka pimpinan wajib bertanggung jawab mengganti segera anggaran yang telah digunakan sehingga tidak akan terjadi keterlambatan penyerapan anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan administrasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, kompetensi sumber daya, dokumen pengadaan barang dan jasa serta Ganti Uang Persediaan tidak

berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Saran pada penelitian ini adalah dapat mempertimbangkan variabel independent lainnya seperti komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan lain-lain. Memperluas sampel penelitiannya dengan cara sampel tidak hanya di satu instansi saja tetapi dengan sampel penelitian beberapa instansi di Sumatera Barat, diharapkan akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih bisa digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Herriyanto, Hendris (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.*
- [2] Priatno, P. A., & Khusaini, M. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1(2).*
- [3] Setyawan (2016) *Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015*
- [4] Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *DJA, Jurnal Administrasi Publik* Juni 2016, Vol. 14 No.1, hal. 1-18.
- [5] Putri, Carlyin Tasya (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.*